

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Peran Kepemimpinan

##### 1. Pengertian Peran

Istilah peran merupakan seperangkat perilaku, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial tertentu.<sup>10</sup>

Dalam konteks sosiologis, peran adalah sesuatu yang melekat pada seseorang yang menggambarkan perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari pemegang peran tertentu dalam struktur sosial.

Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya melakukan tugasnya.<sup>11</sup> Peran mengandung dimensi normatif yang merefleksikan harapan sosial terhadap bagaimana seseorang berperilaku dalam posisi tertentu.<sup>12</sup> Dalam konteks kepemimpinan, peran tidak hanya terkait tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Bruce J Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1986), 25.

<sup>11</sup> M Hasan, "Kepemimpinan Dalam Masyarakat Multikultural Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 16, no. 2 (2022): 146–148.

<sup>12</sup> Ibid, 148.

<sup>13</sup> Harmita Sari, "Kajian Nilai-Nilai Pada Teks Ma'parapa Dalam Prosesi Rampanan Kapa' Di Toraja Utara," *Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar* 2, no. 1 (2017): 58.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan tidak hanya dilihat dari jabatan formal, tetapi juga dari kemampuan pemimpin menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Seorang pemimpin tidak berfungsi hanya sebagai pendamping dan fasilitator dalam membangun hubungan harmonis antarwarga yang berbeda agama, suku, maupun latar budaya. Peran kepemimpinan melibatkan tindakan, tanggung jawab, dan fungsi yang dilakukan seorang pemimpin untuk membimbing, memengaruhi, dan menginspirasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Peran kepemimpinan tidak hanya sekadar tugas administratif, tetapi juga mencakup keterampilan untuk menginspirasi dan memelihara hubungan sosial yang sehat dalam suatu organisasi atau komunitas.<sup>14</sup> Seorang pemimpin diharapkan bertindak sebagai mediator, fasilitator, dan motivator bagi komunitasnya. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengkoordinasi tetapi juga membangun dan melindungi semua kelompok, terlepas dari latar belakang agama, budaya, atau sosial mereka. Dalam konteks sosial, pemimpin harus menyadari kebutuhan masyarakat dan memiliki kemampuan mengelola perbedaan secara adil dan bijaksana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> P.Robbins Stephen, K.Coutler Mary, and Amy Randel, *Management, Global Edition* (Pearson Education Limited, 2021), 215.

<sup>15</sup> L P Sari, "Peran Pemimpin Lokal Dalam Mewujudkan Kerukunan Beragama Di Era Digital," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2023): 58–60.

## 2. Fungsi Peran Kepemimpinan dalam Konteks Kerukunan

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam menciptakan dan mempertahankan kerukunan antarumat beragama. Kepala Lembang sebagai pemimpin lokal bertindak sebagai jembatan antarwarga yang berbeda keyakinan serta menjaga agar tidak terjadi diskriminasi atau konflik dengan yang berbeda agama.<sup>16</sup> Fungsi utama pemimpin adalah mengarahkan, membimbing, dan memotivasi kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang berorientasi pada harmoni sosial.<sup>17</sup> Dalam struktur sosial, pemimpin bertanggung jawab mengembangkan sikap toleransi, mengelola perbedaan agar tidak terjadi konflik.

Selain itu, kepemimpinan harus mampu menciptakan komunikasi yang efektif dan suasana kerja harmonis.<sup>18</sup> Prinsip Kepala Lembang harus memelihara toleransi ditengah masyarakat yang majemuk. Pemimpin yang bijaksana mengajarkan masyarakatnya tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dan mencegah konflik melalui pendekatan yang dapat berpengaruh terhadap orang lain. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak hanya melakukan tugas administratif,

---

<sup>16</sup> M Amin Abdullah, *Multikulturalisme, Toleransi, Dan Kerukunan Beragama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 23.

<sup>17</sup> A Prabowo and S Nugroho, "Dimensi Sosial Dan Moral Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengelola Konflik Sosial," *Jurnal Kajian Konflik* 5, no. 3 (2021): 91–92.

<sup>18</sup> Ibid, 65.

tetapi juga melakukan tugas moral yang membantu menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kesatuan masyarakat yang beragam.<sup>19</sup>

## B. Konsep Kepemimpinan Fungsional

### 1. Pengertian Kepemimpinan Fungsional

Kepemimpinan fungsional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menjalankan fungsi-fungsi penting seperti mengarahkan, memberi instruksi, dan memberdayakan dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi atau masyarakat, dan tidak hanya berdasarkan pada jabatan formal atau wewenang saja.<sup>20</sup> Dalam buku "*Leading Groups in Organizations*" kesuksesan seorang pemimpin tidak bergantung pada posisinya, melainkan pada kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dasar yang dibutuhkan kelompok untuk mencapai tujuannya. Kepemimpinan fungsional dibagi menjadi tiga tugas utama:<sup>21</sup>

#### a. Fungsi Tugas

Fungsi tugas adalah kemampuan pemimpin untuk menetapkan arah, menetapkan tujuan, dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

#### b. Fungsi Relasional

Fungsi relasional menekankan pentingnya membangun

<sup>19</sup> Ibid, 92.

<sup>20</sup> Abdul Gofur et al., *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Dasar Kepemimpinan Dalam Manajemen Organisasi* (Solok: Penerbit MAFY Media Literasi Indonesia, 2024), 15.

<sup>21</sup> J Richard Hackman and Ruth E Walton, *Leading Groups in Organizations* (Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press, 1986), 17.

hubungan sosial yang harmonis, menjaga komunikasi, dan menyelesaikan konflik secara meyakinkan dan damai.

c. **Fungsi Pengembangan**

Fungsi pengembangan melibatkan tanggung jawab pemimpin untuk mendidik dan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Dengan menjalankan peran ini, pemimpin dapat memelihara hubungan keagamaan yang baik, meningkatkan solidaritas, dan menciptakan kehidupan sosial.

**2. Indikator Kepemimpinan Fungsional**

Untuk menilai keberhasilan atau pelaksanaan fungsi kepemimpinan dalam organisasi atau masyarakat, indikator kepemimpinan sangat dibutuhkan. Kepemimpinan fungsional dapat dilihat dalam cara pemimpin menjalankan fungsi-fungsi sosial, moral, dan manajerialnya secara efektif dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Beberapa indikator utama kepemimpinan fungsional adalah sebagai berikut:

a. **Pembinaan**

Kepemimpinan fungsional tidak dilihat dari kedudukan formal tetapi pada pelaksanaan fungsi kepemimpinan yang mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam mengarahkan, membina, dan

---

<sup>22</sup> Ibid, 17.

memberdayakan masyarakat.

b. Bersifat Partisipatif dan Kolaboratif

Pemimpin fungsional melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan bersama. Kepemimpinan ini membangun kerja sama antara pemimpin dan anggota masyarakat demi tercapainya tujuan bersama.

c. Memotivasi

Pemimpin menjadi teladan dalam nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab. Ia menjaga keseimbangan sosial dan memotivasi untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan.

d. Kemampuan Penyelesaian Masalah

Kemampuan dalam menyelesaikan masalah merupakan salah satu aspek penting dalam kepemimpinan fungsional. Dalam perspektif kepemimpinan fungsional, pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan formal, tetapi sebagai fasilitator yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Kemampuan ini menjadi krusial terutama dalam konteks masyarakat majemuk, di mana perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan agama berpotensi menimbulkan konflik. Pemimpin fungsional yang efektif

memiliki kepekaan sosial dalam membaca situasi dan memahami akar permasalahan yang terjadi. Ia mampu membedakan antara masalah yang bersifat struktural, sosial, maupun personal, sehingga penanganan yang dilakukan menjadi tepat sasaran.

### C. Konsep Kepemimpinan Kepala Lembang

#### 1. Pengertian Kepala Lembang

Kepala Lembang merupakan pemimpin pemerintahan desa di tingkat lokal yang memiliki dasar hukum kuat, baik secara nasional maupun daerah. Kedudukan Lembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>23</sup> Di Toraja, Kepala Lembang adalah pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan Lembang, yaitu satuan wilayah adat dan pemerintahan setingkat desa. Keberadaan Lembang di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2006 tentang pemerintahan Lembang, yang menegaskan bahwa Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Dengan demikian, Lembang bukan sekadar entitas administratif, tetapi juga wadah pelestarian nilai-nilai budaya dan adat masyarakat Toraja.

Dalam konteks sosial, Kepala Lembang juga berperan sebagai mediator dan penjaga harmoni, baik dalam hubungan antarwarga maupun antarumat beragama. Hal ini penting, mengingat masyarakat Toraja dikenal memiliki keragaman keyakinan yang tinggi, namun tetap menjunjung tinggi toleransi. Kepala Lembang seringkali menjadi figur sentral dalam menyelesaikan persoalan sosial, menjaga solidaritas, serta memastikan nilai-nilai budaya Toraja tetap terpelihara dalam kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup> Pengakuan ini juga dipertegas dalam regulasi daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Lembang.

Peraturan ini menetapkan bahwa Lembang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan masyarakatnya berdasarkan hak-hak, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional.<sup>25</sup> Tugas dan wewenang Kepala Lembang juga diperinci dalam regulasi turunannya, termasuk Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang. Peraturan Bupati (Perbup) ini memberikan kewenangan kepada Kepala Lembang untuk

<sup>24</sup> Yulius Tangke, *Adat Dan Toleransi Dalam Masyarakat Toraja* (Yogyakarta: Ombak, 2019), 67.

<sup>25</sup> Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 tentang Pemerintahan Lembang. Makale: Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, 2006.

menerapkan kebijakan lokal dan hak asal-usul yang diakui. Dengan demikian, peran Kepala Lembang tidak hanya sebatas administratif, melainkan juga mencakup aspek pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat di tengah masyarakat yang majemuk.<sup>26</sup>

Secara umum, kepemimpinan memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Mempengaruhi orang lain menentukan tujuan.
- b. Memberikan motivasi agar perilaku mereka selaras dengan tujuan.
- c. Memengaruhi orang lain untuk memperbaiki diri, kelompok, dan budaya.
- d. Menjaga hubungan kerja di dalam maupun diluar kelompok.

## **2. Fungsi Kepala Lembang**

Kepala Lembang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Mengkoordinasikan tugas pemerintahan lokal  
Kepala Lembang bertugas menjalankan administrasi lokal di Lembang.
- b. Pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan  
Kepala Lembang menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di

---

<sup>26</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang. 2018.

<sup>27</sup> Stephen P Robbins and Mary Coulter, *Management* (New Jersey: Pearson Education, 2016), 120.

<sup>28</sup> Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2023.

dalam masyarakat Lembang. Serta memelihara harmoni sosial lewat pembinaan dan dialog antar warga.

- c. Memimpin pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  
Kepala Lembang berperan dalam perencanaan dan fasilitasi pembangunan fisik dan sosial di Lembang serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan agar meningkatnya kesejahteraan warga.

- d. Pengelolaan organisasi perangkat Lembang

Kepala Lembang bertanggung jawab mengorganisasi dan mengarahkan perangkat Lembang serta struktur pemerintahan lokal agar berjalan efektif dan efisien.

### **3. Tugas dan wewenang Kepala Lembang**

Secara keseluruhan, Kepala Lembang merupakan pemimpin utama di wilayahnya yang bertanggung jawab penuh atas segala urusan pemerintahan. Sebagai pemimpin Lembang, Kepala Lembang memiliki tugas pokok dan wewenang yang diatur oleh peraturan yang berlaku, yang mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta pelestarian adat. Tugas utama Kepala Lembang adalah menyelenggarakan segala urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta

melakukan pembinaan sosial dan budaya.<sup>29</sup> Dengan kata lain, Kepala Lembang berperan penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat Lembang.

Selain itu, kewajiban Kepala Lembang tidak hanya sebatas administratif, melainkan juga menjaga ketertiban umum, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menjadi mediator dalam konflik sosial.<sup>30</sup> Peran ini menempatkan Kepala Lembang sebagai figur yang harus mampu menyeimbangkan tuntutan birokrasi dengan kebutuhan lokal. Kepala Lembang juga berkewajiban memelihara adat istiadat dan menjaga keharmonisan antarwarga serta antarumat beragama.<sup>31</sup> Dalam masyarakat Toraja yang majemuk, fungsi ini sangat penting untuk memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup berdampingan dengan modernisasi.

Wewenang kepala Lembang mencakup:

a. Menetapkan perangkat Lembang

Kepala Lembang memiliki otoritas untuk memilih dan memberhentikan perangkat Lembang berdasarkan persyaratan yang berlaku. (Perda Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2023 mengatur bahwa perangkat Lembang diangkat oleh kepala Lembang).

---

<sup>29</sup> Rannu Sanderan, *Pemerintahan Lembang Dan Dinamika Sosial Masyarakat Toraja* (Makale: Pustaka Toraja, 2015), 45.

<sup>30</sup> Ibid., 47.

<sup>31</sup> Ibid., 72.

b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan lokal

Kepala Lembang berwenang untuk menerapkan kewenangan lokal termasuk pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik untuk Lembang dalam regulasi daerah. (Perbup Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Lembang).

c. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan keuangan lokal

Kepala Lembang bisa membentuk tim kerja, menentukan struktur staf/perangkat Lembang, menetapkan sistem kerja, termasuk penyesuaian perubahan regulasi tentang organisasi Lembang.

d. Mengelola organisasi dan tata kerja pemerintah Lembang

Kepala Lembang berwenang dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan Lembang, penggunaan anggaran, serta pelaporan atau pertanggungjawaban ke pemerintah daerah dan masyarakat.

e. Membangun kemitraan dan kolaborasi masyarakat.

Kepala Lembang dapat menjalin hubungan dengan masyarakat adat, lembaga kemasyarakatan, dan pihak terkait lain di tingkat Lembang untuk melaksanakan pembangunan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018.

## D. Konsep Toleransi Beragama

### 1. Pengertian Toleransi Beragama

Toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai dan menerima perbedaan keyakinan, kebiasaan, ataupun cara berpikir yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan pendapat sendiri. Sikap ini menuntut adanya pengakuan akan kebebasan dan hak setiap individu untuk beragama serta kebebasan mengekspresikan keyakinannya. Dengan adanya kesadaran toleransi, masyarakat bisa hidup berdampingan secara harmonis, saling menghormati, dan membantu mengatasi masalah. Toleransi bukan berarti melepaskan keyakinan sendiri, melainkan memberikan ruang bagi setiap orang tanpa saling memaksakan, serta aktif mendukung keberagaman tersebut demi hidup damai bersama.<sup>33</sup> Toleransi adalah hak ilmiah setiap manusia untuk memilih dan menjalankan kepercayaannya tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Negara tidak memiliki hak untuk memaksakan satu agama kepada warga negaranya, karena iman sejati tidak dapat dipaksakan melalui kekuasaan atau ancaman hukum. Agama berurusan dengan keselamatan jiwa, sedangkan negara berurusan dengan kesejahteraan dan

---

<sup>33</sup> Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Toleransi: Kontestasi, Akomodasi, Harmoni* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12–14.

keamanan masyarakat.<sup>34</sup> Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama merupakan hak setiap manusia yang tidak dapat diganggu oleh kekuasaan negara atau lembaga keagamaan mana pun.

Secara filosofis, toleransi berakar pada pandangan bahwa pluralitas, atau keberagaman, adalah takdir yang harus diterima sebagai karunia dari Yang Mencipta.<sup>35</sup> Semakin banyak perbedaan yang ada, semakin besar kebutuhan akan pengendalian diri. Mereka menekankan bahwa jika ada pertentangan, kesadaran untuk menjaga kesetiakawanan, toleransi, dan rasa persaudaraan adalah hal yang fundamental. Secara filosofis, toleransi berakar pada pandangan bahwa pluralitas atau keberagaman adalah takdir yang harus diterima. Secara sosiologis, toleransi merupakan bentuk akomodasi untuk menghindari perselisihan dan melawan prasangka.

## 2. Indikator Toleransi Beragama

Dalam buku sosiologi toleransi, ada beberapa tolak ukur yang digunakan untuk menilai seberapa jauh praktik toleransi telah diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, mulai dari tingkat paling bawah hingga paling tinggi.

---

<sup>34</sup> John Locke, *A Letter Concerning Toleration*, ed. James H Tully (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983), 27–30.

<sup>35</sup> B Skli and D Noviani, "Paradigma Filosofis Toleransi Dalam Moderasi Beragama," *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2023): 14.

a. Saling menghormati dan Menghargai

Kemampuan untuk hidup secara berdampingan dengan kelompok yang berbeda dalam damai. sikap menghormati dan mengakui keberadaan, keyakinan, dan praktik kelompok lain secara tulus.

b. Menghargai Hak Asasi Manusia

Adanya kesadaran bahwa setiap individu yang berbeda adalah sesama warga negara yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang sama di hadapan hukum dan Tuhan. Penghormatan terhadap hak menjalankan ibadah dan martabat kemanusiaan.

c. Keterbukaan Antarumat Beragama

Pengenalan terhadap kelompok yang berbeda secara mendalam (latar belakang, nilai, cara hidup) sebagai upaya untuk menghilangkan prasangka. pemahaman mendalam atas pandangan dan praktik kelompok lain, yang dibangun dari pengenalan

d. Solidaritas Sosial

Penghargaan dan perayaan terhadap persamaan dan perbedaan (kemajemukan) sebagai kekayaan bersama. Kebersamaan dan kerja sama lintas agama dalam berbagai kegiatan sosial dan adat.<sup>36</sup>

### **3. Faktor pendukung dan penghambat toleransi**

Ada beberapa faktor pendukung toleransi yaitu:

---

<sup>36</sup> Zuhairi Misrawi, *Sosiologi Toleransi: Kontestasi, Akomodasi, Harmoni* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2020), 23–24.

a. Kekeluargaan dan kebersamaan

Hubungan kekeluargaan dan rasa kebersamaan menjadi landasan kuat untuk membangun toleransi, saling membantu dan mendukung antarpemeluk agama yang berbeda adalah wujud dari nilai-nilai toleransi. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Marlissa, "gotong royong dan kebersamaan" dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, karena kegiatan sosial yang melibatkan semua pihak tanpa memandang latar belakang agama akan mempererat tali persaudaraan.<sup>37</sup>

b. Saling membantu dan mendukung

Dalam kehidupan bermasyarakat sikap saling membantu dan mendukung sangat penting untuk membangun kehidupan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan rasa empati dan membangun hubungan yang kuat.<sup>38</sup>

c. Kegiatan masyarakat

Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial bersama, seperti gotong royong dan acara-acara adat, merupakan faktor pendukung yang kuat. Melalui kegiatan tersebut dapat menjadikan masyarakat dari berbagai latar belakang agama ikut berinteraksi dan mempererat hubungan

<sup>37</sup> Satri Handayani and Febri Giantara, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerukunan Umat Beragama Pada Saat Pandemi Virus Corona," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 11 (2021): 5.

<sup>38</sup> Faidati Trisnaningtyas and Noor Azis Jafar, "Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Studi Di Desa Kapencar," *Jurnal Al-Qalam* 3 (2020): 58.

kekeluargaan. Contoh gotong royong di Lembang Rano adalah bukti nyata bagaimana kegiatan sosial dapat menjadi bukti toleransi, karena mempromosikan pemahaman dan persatuan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata.<sup>39</sup>

d. Peran aktif perangkat desa

Kepemimpinan lokal yang kuat dan bijaksana sangat penting dalam menjaga kerukunan. Pemimpin, seperti Kepala Lembang, dapat menjadi teladan dengan menunjukkan sikap toleran dan menghargai perbedaan.

Adapun Faktor penghambat toleransi yaitu:

a. Rendahnya sikap toleransi

Kurangnya sikap toleransi, yang sering kali muncul dari ketidakpahaman atau cara pandang yang sempit, sehingga menimbulkan masalah. Basyuni menjelaskan bahwa sikap intoleransi dapat muncul karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan peraturan pemerintah terkait kehidupan beragama, yang pada akhirnya dapat berujung pada perselisihan.<sup>40</sup>

b. Kepentingan politik

Politik dapat menjadi pemicu terjadinya konflik, kepentingan

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Muhyayyan Ifkar and Mawardi, "Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Maftuh Basyuni Muhyayyan Ifkar Mawardi Abstrak Pendahuluan Berbagai Kasus Konflik Agama Di Indonesia Terjadi Semenjak Kemunduran Soeharto , Kebangkitan Pemerintahan Reformasi Habibie , Abdurrahman Wahid , Agama . Be" 3, no. 3 (2022): 318.

politik seringkali memanfaatkan isu-isu agama untuk memecah belah masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Konflik kepentingan politik menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kerukunan umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa isu toleransi tidak hanya berdimensi agama, tetapi juga seringkali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan.<sup>41</sup>

c. Fanatisme agama.

Fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinan sendiri tanpa menghargai keyakinan orang lain merupakan faktor penghambat utama. Konflik tindakan intoleransi yang terjadi seperti penyerangan terhadap jemaat yang sedang beribadah di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang pada 27 Juli 2025.

#### **4. Nilai -Nilai Toleransi dalam Kehidupan Sosial Keagamaan**

Ada beberapa nilai-nilai toleransi antarumat beragama dalam menjaga keharmonisan, yakni:

- a. Nilai menghargai perbedaan, adalah nilai yang mengakui bahwa setiap agama memiliki ajaran, ritual, dan tradisi yang berbeda.
- b. Nilai kebersamaan, adalah nilai yang menekankan gotong royong dan kerukunan dalam kehidupan sosial tanpa memandang perbedaan keyakinan.

---

<sup>41</sup> J Kwala Begumit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kerukunan Umat Antar Beragama Di Kelurahan Kwala Begumit," *Ilmu Sosial* (2023): 50.

- c. Nilai keadilan, yakni memperlakukan setiap pemeluk agama dengan setara.
- d. Nilai empati, adalah turut merasakan suka duka umat beragama lain.